

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH **UNTUK**
TRANSFORMASI
MELAYANI NEGERI
Indeks Pemerintah Digital Tahun 2026

25 Juni 2026

Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait

Transformasi Pemerintahan



Responsivitas Birokrasi

Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat



Percepatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif



Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga



Efektivitas Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat



Pemberantasan Korupsi & Kebocoran Anggaran

Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di kalangan birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran



Pengelolaan ASN

Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi



Pelayanan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar



Reformasi Pelayanan Publik

Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat



Atensi Presiden dan hasil yang terlihat di publik

Komponen dan kompleksitas pelaksanaan yang perlu ditangani

Kesuksesan dan pencapaian prioritas presiden secara komprehensif dan aktual

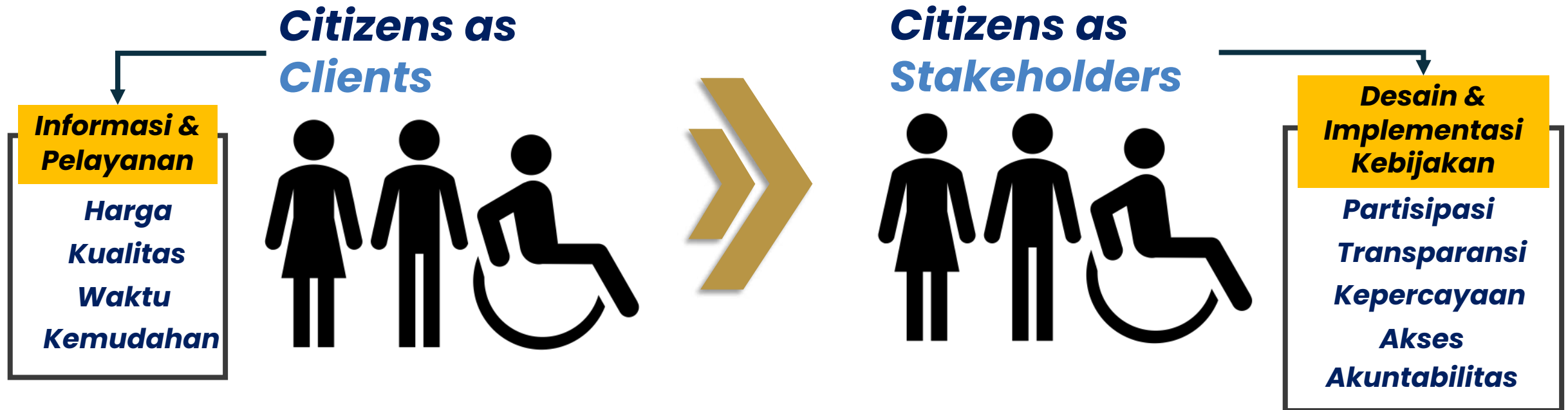
memerlukan

strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan reformasi struktural.

Transformasi Digital Pemerintah dan Tata Kelola Data Pembangunan sebagai bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden

Future Governance (Governance 5.0)

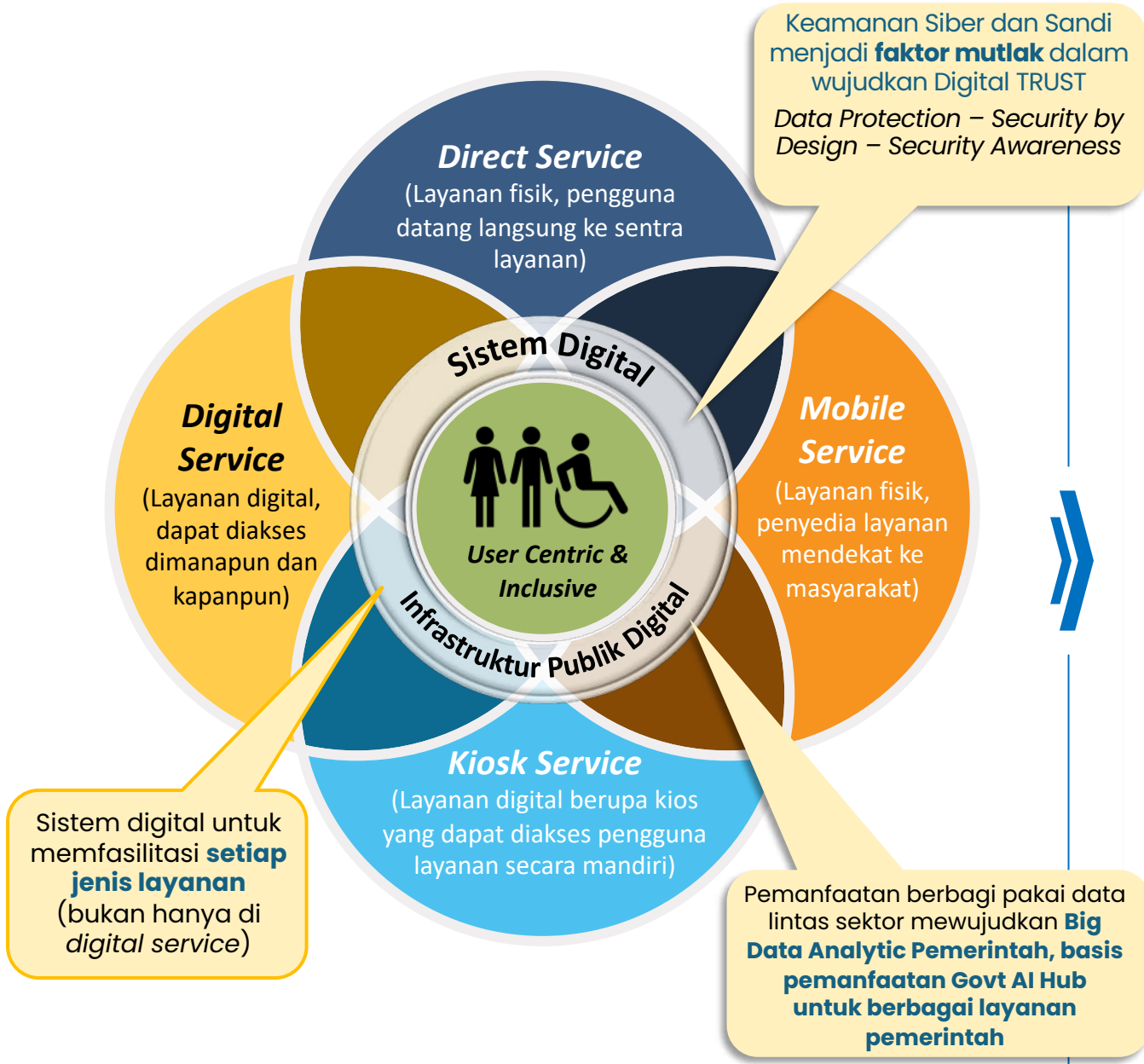
a mindset shift: "from governing for citizens to governing with citizens"



Keberhasilan layanan digital pemerintah dapat terwujud dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi layanan digital.

Strategi Perwujudan Pelayanan Publik

Fokus pada Target Presiden dan Kebutuhan Masyarakat



KONVERGENSI STRATEGI PELAYANAN PUBLIK

1. Tujuan utama **bukan pemanfaatan teknologi**, tetapi **kemudahan penggunaan dan inklusifitas layanan yang fokus ke kebutuhan pengguna**
2. Transformasi Tata Kelola Pemerintah menjadi **fondasi dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik**
3. Menjadikan pengguna/masyarakat sebagai sentral dalam identifikasi pembentukan layanan pemerintah, **melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai fitur integral dalam layanan digital pemerintah.**
4. **Memanfaatkan momentum berbagai Target Prioritas Presiden**
 - a. Inpres 3/2025 Swasembada Pangan,
 - b. Inpres 4/2025 DTSEN,
 - c. Inpres 5/2025 Transformasi Kesehatan,
 - d. Inpres 7/2025 Pendidikan,
 - e. Inpres 8/2025 Pengentasan Kemiskinan,
 - f. Inpres 9/2025 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Layanan Digital Pemerintah sebagai bagian dari Ekosistem Pelayanan Publik

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah)

BUMN dan BUMD

Nonpemerintah, Non-BUMN/BUMD, tetapi ketersediaannya misi negara

MANUAL & HIBRIDA

Pelayanan Langsung



Pelayanan Mandiri

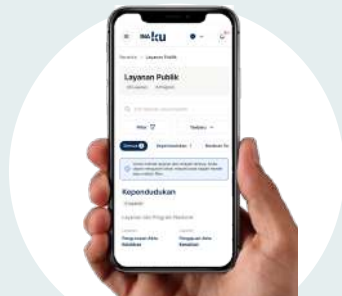


Pelayanan Bergerak



DIGITAL

Layanan Digital Pemerintah (LDP)



- Fokus transformasi digital tidak terbatas pada layanan yang *end-to-end* dilakukan secara digital saja. Transformasi ini juga menyentuh pelayanan langsung, mandiri, dan bergerak—seperti melalui digitalisasi proses *back-office* layanan agar efisien dan terintegrasi.
- **PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 Pasal 10** Evaluasi Kinerja Pemdi merupakan bagian integral dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyelenggara

terhubung

Layanan Digital Pemerintah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh pemerintah



EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Evaluasi yang Bergerak Secepat Perubahan

Ringkas di indikatornya, sekali serah datanya, otomatis skornya, fleksibel waktunya.

Saat ini, tim sedang menyusun skema evaluasi Pemerintah Digital yang sepenuhnya diperbarui—tidak sekadar revisi teknis, tapi perombakan menyeluruh cara kita menilai kinerja digital pemerintah.

Simplifikasi Indikator Indeks Pemerintah Digital

1. Penyederhanaan jumlah indikator dari 47 ke 37, 25, 21 sekarang menjadi **20 indikator**.
2. Fokus pada indikator yang relevan, berdampak langsung pada kepuasan pengguna, dan selaras dengan target keterpaduan layanan digital.
3. Tujuan: **mempermudah pengisian, mengurangi beban administratif, meningkatkan kualitas data.**



Memperkuat *Once-Only Principle*

1 Memfasilitasi integrasi dan pertukaran data antar-K/L pengampu sehingga K/L/Pemda cukup menyerahkan data satu kali saja. Sebagai contoh, pada indikator tata kelola data, penilaian akan merujuk pada hasil Indeks SDI yang sudah tersedia.

Menuju *Real-Time Integrated Scoring*

2 Mengambil data otomatis dari portal lain, termasuk nilai Indeks SDI, melalui API atau mekanisme yang disepakati.

Skema Baru – *Flexible & On-Demand*

- Dari sistem tahunan serentak → bisa dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Pemda/Instansi.
- Hasil penilaian dapat langsung diverifikasi saat itu juga.

5 Agustus 2025, Dibawah koordinasi Deputi RBKunwas untuk melakukan **konsolidasi dalam pengukuran capaian Sasaran 1 pada Indeks Reformasi Birokrasi**, dengan **Indeks Satu Data Indonesia** (Bappenas), **Indeks Jaringan Informasi Geospasial Nasional** (BIG), **Indeks Pembangunan Statistik** (BPS), **Indeks Digitalisasi Arsip** (ANRI), **Indeks Inovasi** (BRIN). Semua instansi terakomodir dan akan ditindaklanjuti untuk penyamaan lokus, *cross-scoring* untuk penyederhanaan, dan update pada pertemuan selanjutnya

Referensi Regulasi Evaluasi Pemerintah Digital

Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 - 2029

Tabel 3.10
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
2	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
4	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00—64,99	71,00—72,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 ^{a)}	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 ^{b)}
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5

Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029, lampiran 1 hal 188 mengamanatkan **perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Pendi sejak tahun 2026** dengan target capaian sebesar 1.7 poin dengan target penilaian di 640 IPPD.

b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi **Indeks Pemerintah Digital** sehingga target nasional disesuaikan.



Lima Perbedaan Kunci SPBE & Pemdri

Ringkasan perubahan pendekatan dari fokus TIK menuju layanan digital berdampak dan berorientasi pengguna.

SPBE

Kerangka Evaluasi SPBE

Penekanan pada penguatan TIK dan kematangan layanan

PEMDI

Kerangka Evaluasi PEMDI

Penekanan pada dampak layanan digital & kepuasan pengguna



Fokus pada TIK sebagai enabler layanan.



Serentak dan tidak fleksibel (dibuka & ditutup pada rentang waktu tertentu).



Belum terintegrasi lintas sistem.



Penguatan TIK sebagai fokus utama.



Mengukur tingkat kematangan dan kualitas layanan.

Pergeseran paradigma

Metode pelaksanaan

Integrasi antar-indeks

Fokus indikator

Tujuan

Fokus pada layanan digital yang berdampak.

Fleksibel, on-demand; dapat sewaktu-waktu upgrade nilai.

Pemanfaatan indeks dari instansi lain; interoperabilitas data antar- sistem.

Kepuasan pengguna sebagai fokus utama.

Mengukur dampak kebijakan PEMDI dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.



Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Menuju Evaluasi Kinerja Pemdi yang Berdampak



SPBE

INDEKS SPBE (Hulu)

KEBIJAKAN

13%

Kebijakan (10 Indikator)

TATA KELOLA

25%

Perencanaan Strategis (4 Indikator)

TIK (4 Indikator)

Penyelenggara SPBE (2 Indikator)

MANAJEMEN

16.5%

Manajemen (8 Indikator)

Audit TIK (3 Indikator)

LAYANAN

45.5%

Layanan Adm Pemerintah (10 Indikator)

Layanan Publik (6 Indikator)

Total 47 Indikator SPBE

Isu SPBE:

IPPD *fatigue* pada proses pengisian indikator yang banyak (47 Indikator)
IPPD harus **mengisi beberapa kali** di aspek substansi yang sama dengan berbagai indeks yang dimiliki instansi pusat lainnya.
Pengisian **bersifat dokumen administratif (regulation based)** belum mengukur dampak dan kepuasan pengguna layanan

Solusi Pemdi:

Jumlah **indikator penilaian berkurang** 27 indikator (dari 47 menjadi 20 indikator)
Penilaian dilakukan **kolaborasi antar K/L dan terintegrasi** (API untuk saling bertukar data) sehingga IPPD tidak harus mengisi berbagai isian indeks dengan substansi sama
Pelaksanaan lebih efisien melalui mekanisme **flexible & on-demand** melalui *tool* tauval Pemdi secara *online*
Mengukur **keterpaduan layanan digital** dan **kepuasan pengguna**

Pemerintah Digital

INDEKS PEMDI (Hulu – Hilir)

Tata Kelola dan Manajemen (2 Indikator) 10%

Penyelenggara (2 Indikator) 10%

Data (4 Indikator) **NEW** 15%

Keamanan Siber (4 Indikator) 15%

Teknologi Digital (2 Indikator) 10%

Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (4 Indikator) **NEW** 15%

Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (2 Indikator) **NEW** 25%

Total 20 Indikator Pemdi

Gambaran Umum Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemdi Tahun 2026

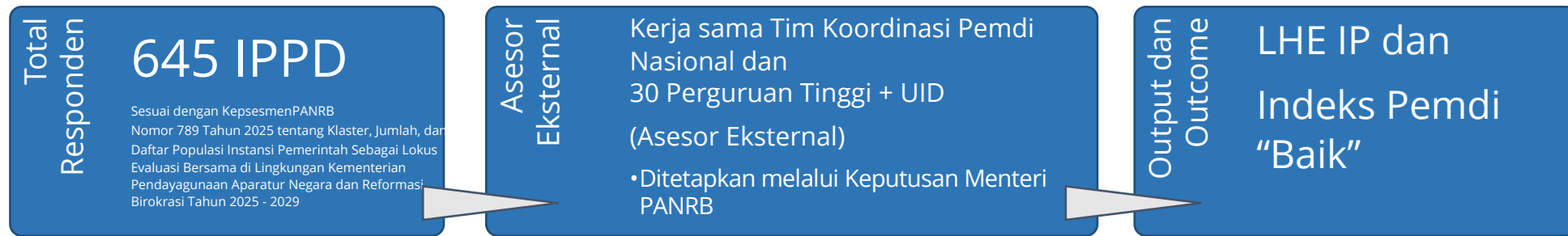
Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN



PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Tim Koordinasi Pemdi Nasional



Kolaborasi dengan



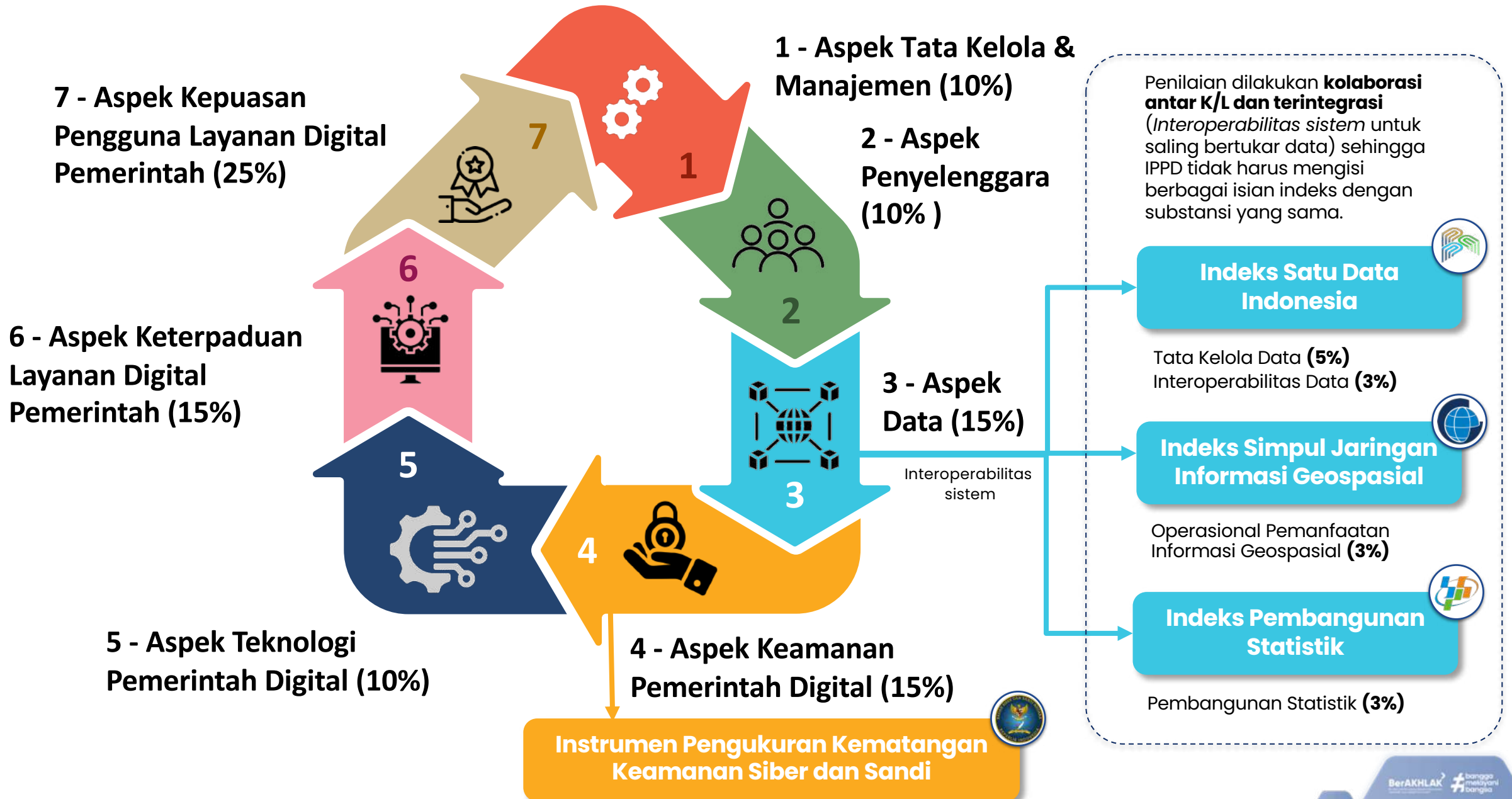
Tim Asesor Pemantauan Pemdi 2026*







Indikator Terintegrasi Indeks Pemerintah Digital

Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital



Indikator Indeks Pemerintah Digital

Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

TANTANGAN	EVALUASI	INDIKATOR
Kompleksitas Regulasi	Aspek Tata Kelola & Manajemen (10%)	1. Tata Kelola Pemerintah Digital (5%)     2. Manajemen Layanan Digital Pemerintah (5%)     
Keterbatasan Literasi dan Kompetensi Digital	Aspek Penyelenggara (10%)	3. Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital (5%)     4. Kolaborasi Digital Pemerintah (5%)  
Fragmentasi Pengelolaan Data	Aspek Data (15%)	5. Tata Kelola Data (Indeks SDI/5%)  6. Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG/3%)  7. Pembangunan Statistik (IPS/3%)  8. Pelindungan Data Pribadi (4%)  
Ancaman Keamanan dan Privasi Data	Aspek Keamanan Pemerintah Digital (15%)	9. Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital. (4%)  10. Keamanan Pemerintah Digital (4%)  11. Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (3%)  12. Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (4%) 
Tren Perkembangan Teknologi	Aspek Teknologi Pemerintah Digital (10%)	13. Aplikasi Pemerintah Digital (5%)  14. Infrastruktur Pemerintah Digital (5%) 
Fragmentasi Layanan Digital Pemerintah	Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)	15. Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Unit dan Instansi (4%)     16. Integrasi Aplikasi (4%)  17. Portal Layanan Digital Pemerintah (4%)  18. Interoperabilitas Data (Indeks SDI/3%) 
Ekspektasi Masyarakat	Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (25%)	19. Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (10%)  20. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (15%) 



BERTEMU DI TITIK UKUR YANG SAMA

Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Indeks RB	Nilai SAKIP	Indeks SPBE
Sangat Memuaskan/AA (Nilai >100)	Sangat Memuaskan/AA (Nilai >100)	
Memuaskan/A Memuaskan dg cttn/A- (Nilai > 80 - 100)	Memuaskan/A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan (4,2 - 5)
	Sangat Baik/BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik (3,5 - < 4,2)
Baik/B (Nilai > 60 - 70)	Baik/B (Nilai > 60 - 70)	Baik (2,6 - < 3,5)
Cukup/CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup/CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (1,8 - < 2,6)
Kurang/C (Nilai > 30 - 50)	Kurang/C (Nilai > 30 - 50)	Kurang (< 1,8)
Sangat Kurang/D (Nilai = 0 - 30)	Sangat Kurang/D (Nilai = 0 - 30)	



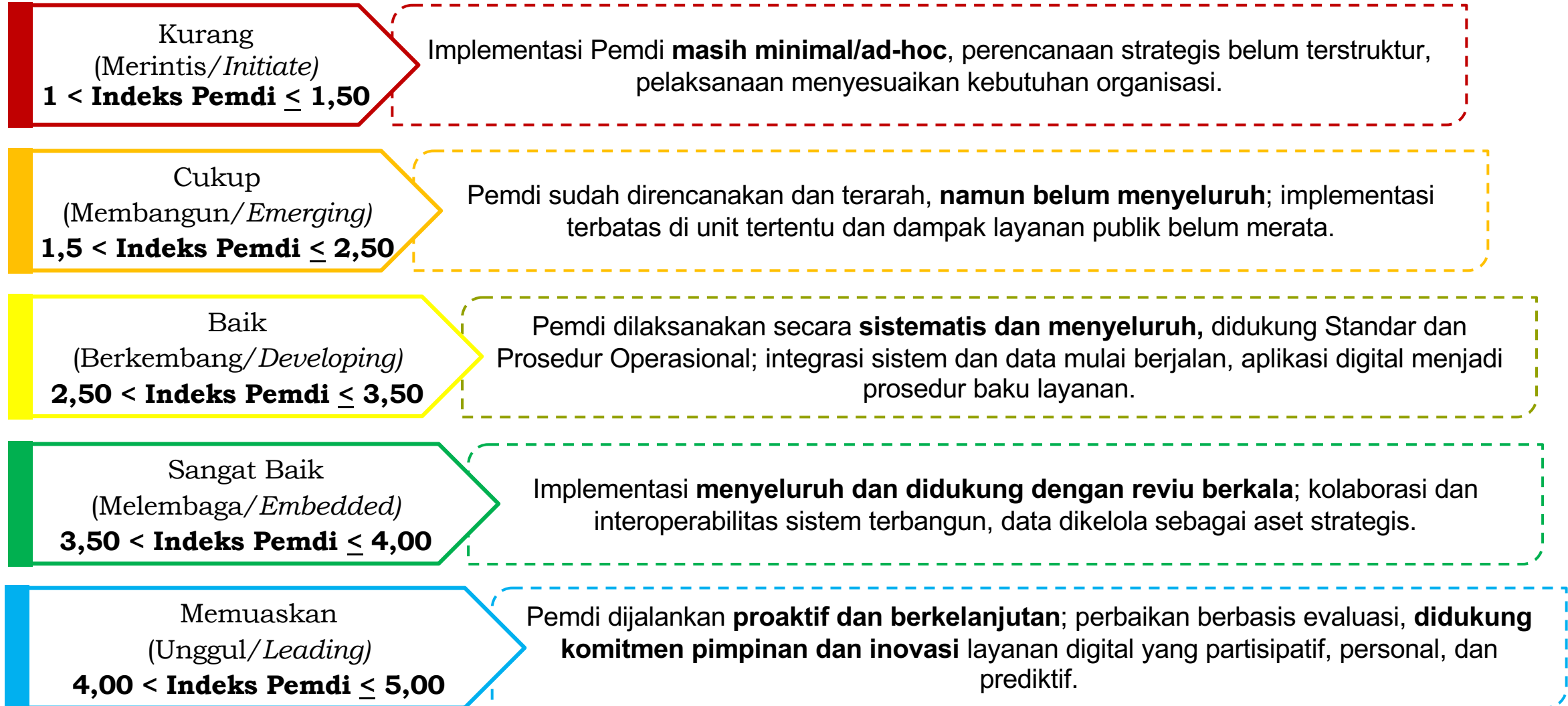
Indeks RB	Indeks SPBE/Pemdi	Rentang Nilai (Skala 5 – Target RPJPN)
Leading	Memuaskan/Unggul	4,00 < s.d. ≤ 5,00
Embedded	Sangat Baik /Melebaga	3,50 < s.d. ≤ 4,00
Developing	Baik/Berkembang	2,50 < s.d. ≤ 3,50
Emerging	Cukup/Membangun	1,5 < s.d. ≤ 2,50
Initiate	Kurang/Merintis	1 < s.d. ≤ 1,50

Deputi RB Kunwas dan Deputi TDP menyepakati **penyamaan tingkat dan rentang penilaian antara Indeks RB dan Indeks Pemdi**, diselaraskan dengan BSSN, BPS, BIG, serta Indeks SDI, sebagai acuan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan lintas aspek.

Pengukuran Indeks Pemdi disepakati dengan instansi terkait untuk dilaksanakan secara kolaboratif baik aspek waktu dan mekanisme penilaian

Instrumen Penilaian Indeks Pemdi selaras DBRBN

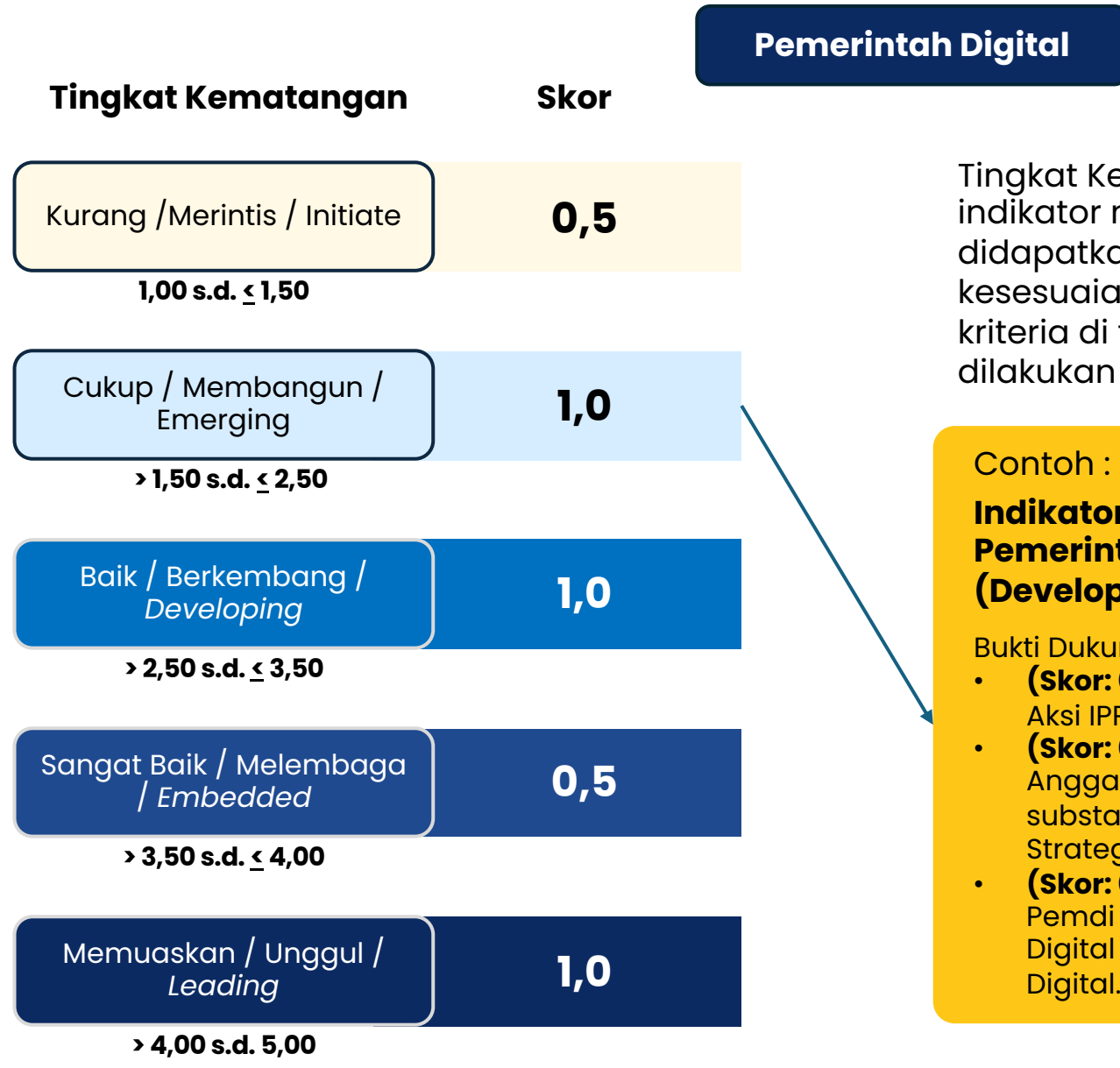
Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital





Perubahan tata cara penilaian pada Indeks Pemerintah Digital

Rancangan Perubahan metode penilaian Indikator pada Indeks Pemdi



Tingkat Kematangan di setiap indikator memiliki skor. Skor ini didapatkan dari penilaian kesesuaian bukti dukung dengan kriteria di tiap indikator yang dilakukan asesmen

Contoh :

Indikator Tata Kelola Pemerintah Digital (Developing)

Bukti Dukung:

- **(Skor: 0.34)** Dokumen Rencana Aksi IPPD.
- **(Skor: 0.33)** Perencanaan dan Anggaran yang mendukung substansi Pemdi pada Rencana Strategis IPPD.
- **(Skor: 0.33)** Pengisian Arsitektur Pemdi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah melalui SIAP Digital.



Perubahan tata cara penilaian pada Indeks Pemerintah Digital

Rencana Perubahan Aplikasi Tauval

SPBE

Indikator 1

Domain: Kebijakan SPBE

Aspek: Kebijakan Internal Toko Kelola SPBE

Indikator: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (I2001)

Penjelasan Indikator: **Urutah Semua Data Dukung Terkait**

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2024	PM	PD	PI	Final
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap: pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengaitkan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direvisi dan diawasi secara berkala.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil revisi dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Telah dilaksanakan revisi dan evaluasi atas kebijakan internal SPBE Kementerian Koperasi, yang termuat dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 22 Tahun 2021 serta telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Penilaian Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, yang di dalamnya tercantum pasal tentang Arsitektur SPBE sebagai acuan penyusunan arsitektur SPBE Kementerian Koperasi.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Catatan Penilaian Dokumen
Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE pada Kementerian Koperasi, dimana tercantum dan telah dibuktikan secara data dukung PM/KOP/UKM Nomor 13 Tahun 2023 sebagai kelanjutan dari Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 22 Tahun 2021, yang telah.

Catatan Penilaian Interviu

Catatan Penilaian Ythabai

Catatan Final
sesuai hasil revisi dari tim koordinasi nasional sehingga dapat mencapai level 5

File: Unggah baru atau unggah file

Daftar Dokumen
F2401-6-Indikator_01
F2401-6-Indikator_01
F2401-6-Indikator_01
F2401-6-Indikator_01
F2401-6-Indikator_01
Hasil_Revisi_Kebijakan_Internal_Arsitektur_SPBE_Tahun_2023.pdf
indikator1-MemorandumDirektori_Noz36Th2021.pdf

Pemerintah Digital

No	Data Dukung	Status	Value	#
Tingkat Kematangan Level 1		PM : 0,17 / 0,5		Detail
1	Rancangan Rencana Strategis pada Instansi Pusat untuk pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Instansi Pusat	<input checked="" type="checkbox"/> Upload	0,17	Detail Unggah
2	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Daerah atau	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,17	Detail Unggah
3	Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital.	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,17	Detail Unggah
Tingkat Kematangan Level 2		PM : 0 / 1		Detail
1	Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
2	Bukti kegiatan konsolidasi kolaboratif Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam menyusun Rencana Aksi Pemerintah Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
3	Perencanaan dan Anggaran yang mendukung Rencana Aksi Pemerintah Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
4	Pengisian Arsitektur Pemerintah Digital pada sebagian Layanan Digital Pemerintah melalui SIAP Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
Tingkat Kematangan Level 3		PM : 0 / 1		Detail
1	Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital.	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
2	Bukti kegiatan konsolidasi kolaboratif Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam menyusun Rencana Aksi Pemerintah Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
3	Perencanaan dan Anggaran yang mendukung Rencana Aksi Pemerintah Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah
4	Pengisian Arsitektur Pemerintah Digital pada seluruh Layanan Digital Pemerintah melalui SIAP Digital	<input checked="" type="checkbox"/> Belum Upload	0,25	Detail Unggah

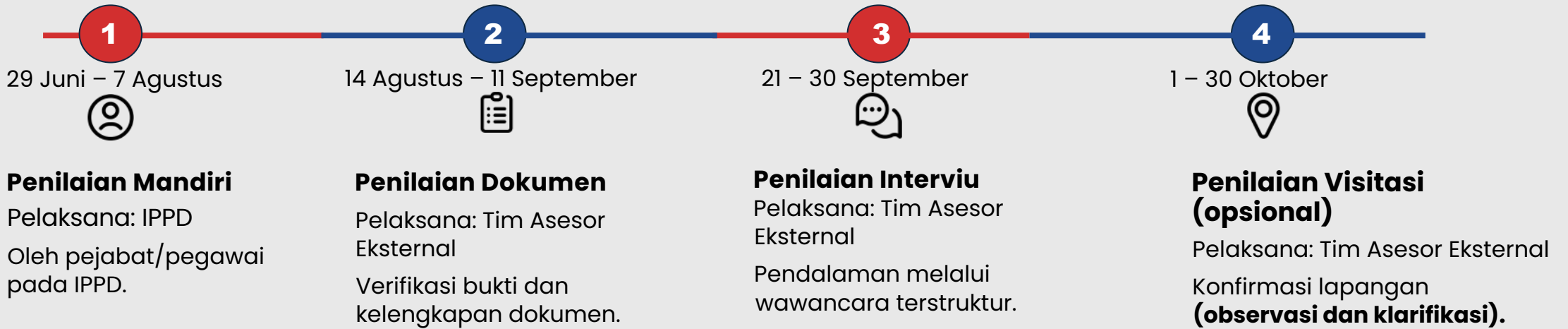
Perubahan yang dilakukan:

- Setiap indikator di detilkan sesuai dengan kebutuhan data dukung yang secara spesifik dibutuhkan
- Setiap data dukung yang diupload akan terus disimpan dan dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan
- Setiap penjelasan dijelaskan pada tiap data dukung

Alur Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) 2026

Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Tahapan Evaluasi



Komposisi Tim Asesor Eksternal

Digunakan pada tahapan 2–4

Anggota:

- ASN
- Akademisi dan atau tenaga ahli



Hasil Evaluasi: Indeks Pemdi

Penetapan dan penyampaian hasil

- Ditetapkan oleh Menteri dan dijadikan dasar penyusunan profil Indeks Pemdi
- Disampaikan oleh Deputi kepada IPPD melalui platform tauval.

Transformasi Tak Bicara Soal Siapa Paling Hebat,
Transformasi Bicara Soal Siapa yang Mau Terlibat,
karena **Transformasi** Bukan Hasil Satu Tangan,
Tapi Ribuan Niat yang Jalan Beriringan.

TERIMA KASIH

